

## PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN

Oleh :  
**Sutrisno**  
**Ilmu Hukum FH-UPNV Jatim**

### ABSTRAK

Rasio penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri yang terus meningkat membuat kasus permohonan banding dan sengketa pajak juga terus bertambah. Bertambahnya kasus perpajakan ini membuat pengadilan pajak menjadi hal yang semakin dibutuhkan saat ini. dengan tingginya kasus gugatan dan banding, eksistensi pengadilan pajak di Indonesia harus menjadi aparat negara yang nyata dan mampu menjadi sarana negara dalam mendorong kemajuan dan menumbuhkan pembangunan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa perpajakan dan prosedur sengketa perpajakan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam sengketa tersebut

*Kata kunci : Pajak, Sengketa Perpajakan*

### PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak adakalanya terjadi silang pendapat antara Wajib Fiskus. Oleh karena itu, agar dapat dicapai penyelesaian sengketa pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP) banyak mengandung kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain adanya kewajiban melunasi seluruh jumlah pajak yang terutang sebelum mengajukan banding, tidak adanya kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, serta kurang memberikan kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak maupun Fiskus. Demikian pula penyelesaian sengketa pajak seharusnya mampu memberi jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang

bersengketa serta dapat dilakukan melalui prosedur dan proses yang cepat, transparan, murah, dan sederhana.

Kelemahan lainnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya dengan peradilan lainnya. Untuk itu dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa, proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, proses penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi

50% (lima puluh persen ) kewajiban perpajakan terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak. Juga putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian adanya perubahan kebijakan negara, dalam penyelesaian sengketa pajak yang tadinya dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diubah menjadi oleh Pengadilan Pajak berdasarkan undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena kebijakan perpajakan berbentuk peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti model perumusan kebijakan dapat memakai model sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton.

Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah : Apakah dalam perumusan kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Thn 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 27.TLN Nomor 4189) telah sesuai dengan sistem politik yang ada di Indonesia ?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa perpajakan dan prosedur sengketa perpajakan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam sengketa tersebut. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, teoritis dan sosiologis. Pendekatan secara yuridis adalah melakukan pembahasan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada terutama Kemudian pendekatan teoritis dilakukan dengan mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa pajak. Pendekatan sosiologis yaitu pengamatan

peneliti terhadap prosedur dan penyelesaian sengketa pajak

Pengumpulan data diperoleh dari data primer yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap prosedur dan penyelesaian sengketa pajak, sedangkan data sekunder bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan masalah mempergunakan metode deskriptif komparatif dengan menggunakan dan menafsirkan peraturan yang ada dan berlaku. Kemudian peraturan-peraturan yang ada dan sedang berlaku tersebut dibahas secara komparatif dengan data yang ada yang diperoleh di lapangan untuk memberi jawaban atas masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menganalisis perumusan kebijakan perpajakan dalam sengketa pajak ini, peneliti menggunakan model atau pendekatan sistem politik yang disampaikan oleh David Easton. Model/Konsep & "sistem politik & " mempunyai arti sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan ( Support ) dan sumber-sumber ( resources ) semuanya ini adalah masukan-masukan ( inputs )-menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat ( outputs ). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs. (M.Irfan Islamy,1984, hal.50-51)Tuntutan-tuntutan ( demands ) timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok setelah memperoleh respons dari adanya peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang ada di lingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara. Tuntutan-tuntutan ini bisa berasal dari dalam sistem politik itu sendiri (misalnya dari anggota birokrasi atau pejabat pemerintah) atau berasal dari luar system politik

(misalnya dari anggota masyarakat, kelompok kepentingan dan sebagainya). Suatu sistem politik akan menyerap berbagai macam tuntutan (baik dari dalam maupun luar), dan dapat terjadi bahwa diantara tuntutan-tuntutan tersebut tidak relevan atau bertentangan satu-sama lain. Dalam hal seperti itu maka diperlukan pengaturan terhadap tuntutan-tuntutan tersebut dan memaksakan pengaturan itu kepada pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan agar supaya tuntutan-tuntutannya dapat dikonfirmasi ( diproses ) di dalam sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan. Kebijakan ini merupakan (Output) yang berupa serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan kebijakan itu sendiri. (Sutopo, 2000)

Berdasarkan pendekatan sistem politik, dampak kebijakan baik yang positif (intended) maupun yang negatif (unintended) akan difungsikan sebagai umpan balik dan dimasukkan ke dalam masukan ( input ) dalam proses perumusan kebijakan negara berikutnya. Dalam perumusan kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak harus mencakup :

1. Input : Masalah Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak ;
2. Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak ;
3. Output : Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak ;
4. Impacts ( dampak )

**Input: Masalah kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa**

Proses lahirnya kebijakan perpajakan berupa Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak terlepas dari adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa dalam bidang perpajakan. Hal ini dapat kita lihat dari keinginan pemerintah untuk mengadakan perubahan dalam penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan sebelumnya oleh Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak ( BPSP ). Selain itu pula ada tuntutan-tuntutan dari pihak yang bersengketa baik Wajib Pajak maupun Fiskus ( Pemerintah ) bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) belum memberi jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa, serta proses persidangan belum dilakukan secara cepat, transparan, murah dan sederhana. Kelemahan lainnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ) belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya dengan peradilan lainnya. Juga ada rekomendasi dari kalangan Hakim Tata Usaha Negara sendiri kepada pemerintah, oleh karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ) bukan merupakan badan peradilan, maka terhadap Putusan BPSP dapat dilakukan upaya administrasi sesuai Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini mengingat BPSP bukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan sebagai pengganti Majelis Pertimbangan Pajak ( MPP ) yang dibentuk berdasarkan Regeling van het Beroep in Belastingzaken ( Staatsblad Tahun 1927 No. 29), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1959 Lembaran Negara Tahun 1959 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748 ). ( Gema Peratun No. 10 Tahun 1999 ).

Dalam Penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa contoh banding administratif antara lain Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak. Sedangkan pengganti Majelis Pertimbangan Pajak yakni BPSP, putusannya merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ( Pasal 76 Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 ). Sehingga di dalam praktek, sengketa pajak sering menimbulkan permasalahan. Disatu pihak (Wajib Pajak) berpegang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan di lain

pihak ( Fiskus ) berpegang pada Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dilihat latar belakang lahirnya kebijakan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tersebut yaitu :

- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan.
- Bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana.
- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung.
- Bahwa karena diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

#### **Proses pembuatan kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak**

Proses pembuatan kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak tersebut bersifat politis, dimana dalam prosesnya terlibat berbagai kelompok kepentingan. Terlihat dari pendapat-pendapat fraksi-fraksi di DPR yang membahas RUU tentang Pengadilan Pajak. Yang sebelumnya diawali masukan-masukan dari berbagai macam policy stake holder yaitu mereka-mereka yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak tersebut.

Adanya masukan-masukan ( inputs ) dalam perumusan kebijakan perpajakan dalam sengketa pajak ini diproses oleh

lembaga yang berwenang, dalam hal ini pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ). Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga UUD 1945. Pemerintah dalam pidato pengantar lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati beberapa substansi pokok antara lain :

- i. Perubahan nama RUU Badan Peradilan Pajak menjadi RUU Pengadilan Pajak
- ii. Pengadilan Pajak merupakan salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara ;
- iii. Pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial Pengadilan Pajak berada di Departemen Keuangan sedangkan pembinaan teknis peradilan di bawah Mahkamah Agung. Undang-

Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah diundangkan pada tanggal 12 April 2002 dengan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI No.4189.

Hal ini sesuai dengan system politik yang ada di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana telah diubah dengan Perubahan Ketiga UUD 1945.

#### **Output: Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bersifat khusus yang menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu :

- Sidang peradilan Pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup,
- sedangkan pembacaan putusan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Lain halnya dengan Badan Penyelesaian Sengketa yang persidangannya dinyatakan tertutup untuk umum (Pasal 49 ayat 1 UU No.17 tahun 1997).

- Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain.
- Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan
- Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya.

Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, disamping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada Peradilan Umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. konsekuensi dari kekhususan tersebut dalam undang-undang nomor 14 tahun 2002 diatur hukum secara tersendiri untuk menyelenggarakan pengadilan pajak. Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat oleh karena itu dalam undang-undang tersebut diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik ditingkat Pengadilan Pajak maupun ditingkat Mahkamah Agung. Selain itu, proses penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas.

Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan wajib pajak untuk melunasi 50 % ( lima puluh persen ) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak. Dalam BPSP Wajib Pajak diharuskan membayar 100 % ( membayar

lunas ) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. (Pasal 34 UU No. 17 tahun 1997).tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara sedangkan sidangnya pada hakekatnya dilakukan ditempat kedudukannya namun dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan ditempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **Impacts : ( dampak )**

Impacts (dampak ) dari kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak berupa Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut agar upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara terus ditingkatkan dan dikelola secara bijak dan adil. Upaya meningkatkan penerimaan pajak lebih mudah dilakukan dibanding meningkatkan keadilannya. Dampak dari upaya meningkatkan penerimaan pajak seringkali menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi instansi perpajakan dengan pihak Wajib Pajak, terutama dalam menyelaraskan beban pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban dan penggunaan hak di bidang

perpajakan. Sekalipun tata cara menentukan besar pajak terutang secara self assessment telah dikembangkan dengan pola pengawasannya yang sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun adanya perbedaan pendapat antara aparat pajak/pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam membedakan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiscal (Muh. Hary Djatmiko, 2001 hal.1 )

Dengan demikian Pengadilan Pajak berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak ) untuk menjamin hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

### KESIMPULAN

Dalam perumusan kebijakan perpajakan khususnya dalam penelitian ini bahwa penyelesaian perpajakan telah lahir kebijakan perpajakan baru berupa Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak menggantikan Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Perumusan kebijakan perpajakan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut dilihat dari system politik diawali:

1. Input : Masalah Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak ;
2. Proses Pembuatan Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak ;
3. Output : Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak
4. Impacts ( dampak ).

Proses kebijakan perpajakan dalam bidang penyelesaian pajak ini diawali langkah pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, yang merupakan keinginan Pemerintah berdasarkan masukan-masukan berupa aspirasi masyarakat yang berkembang, khususnya aspirasi Wajib

Pajak. Dan DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Pengadilan Pajak untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa perpajakan berupa output-nya yaitu : Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah diundangkan pada tanggal 12 April 2002 dengan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27

Tambahan Lembaran Negara RI No.4189. Hal ini sesuai dengan system politik yang ada di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana telah diubah dengan Perubahan Ketiga UUD 1945.

Perbedaan yang prinsip dari UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dibandingkan dengan UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ) antara lain adalah :

- Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus di bidang tata usaha negara yang berpuncak ke Mahkamah Agung. BPSP tidak berpuncak ke Mahkamah Agung.
- Pada Pengadilan Pangadilan Pajak, banding terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Wajib
- Pajak harus melunasi 50 % dari kewajiban perpajakan terlebih dahulu. Dalam BPSP harus 100 %.
- Pemeriksaan pada Pengadilan Pajak dilakukan dengan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum sedangkan dalam BPSP dinyatakan tertutup untuk umum.

Dampak yang diharapkan dari Undang-Undang No. 14 tahun 2002 bagi pemerintah yaitu dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara terus ditingkatkan dan dikelola secara bijak dan adil. Sedangkan bagi Wajib Pajak menjamin hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djarmiko, Hary, 2001. **Prinsip-prinsip Beracara Dalam Mekanisme Peradilan Pajak Pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak**, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Islamy, M. Irfan, 2002. **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutopo, 2000, **Kebijaksanaan Publik dan Implementasi, Lembaga Administrasi Negara**, Majalah GEMA PERATUN, Nomor : 10 Tahun 1999.-
- UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga UUD 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-
- Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.-
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.